

**SUPERVISI PENDIDIKAN SEBAGAI TINDAKAN MORAL : KAJIAN FILOSOFIS
TERHADAP ETIKA DAN HUMANISASI DALAM PEMBINAAN GURU**

Muhammad Hasan Basari

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Jabar Indonesia

Basarihasan.1966@upi.edu

Maulidya Radiyahunnisa

Universitas Islam Depok (UID) Depok Jabar Indonesia

maulidyaradiyahunnisa0805@gmail.com

Della Rachmalia

Universitas Islam Depok (UID) Depok Jabar Indonesia

rachmaliadella4@gmail.com

Rezq Aprija

Universitas Islam Depok (UID) Depok Jabar Indonesia

rezqaprija48@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji supervisi pendidikan sebagai tindakan moral melalui pendekatan filosofis yang menyoroti nilai-nilai etika dan humanisasi dalam pembinaan guru. Kajian ini bersifat kualitatif dengan metode studi pustaka, menggunakan berbagai literatur filsafat pendidikan, etika profesional, dan teori supervisi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa supervisi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses teknis untuk meningkatkan kinerja guru, tetapi juga sebagai tindakan moral yang menuntut tanggung jawab, empati, dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Supervisi yang berlandaskan nilai etika berperan penting dalam menciptakan hubungan yang dialogis, saling percaya, dan memberdayakan antara supervisor dan guru. Perspektif humanistik menegaskan bahwa tujuan akhir supervisi adalah pembentukan guru yang reflektif, otonom, dan berkarakter, bukan sekadar peningkatan keterampilan pedagogis. Dengan demikian, supervisi pendidikan perlu dipahami sebagai proses humanisasi yang menempatkan guru sebagai subjek yang memiliki nilai dan potensi, bukan sebagai objek penilaian semata. Kajian ini menegaskan bahwa dimensi moral dalam supervisi merupakan fondasi utama bagi terciptanya budaya pendidikan yang etis, adil, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Kata kunci : supervisi pendidikan, etika, humanisasi, moral, pembinaan guru

Abstract

This study aims to examine educational supervision as a moral act through a philosophical approach that highlights ethical values and humanization in teacher development. This research employs a qualitative literature review method, drawing from educational philosophy, professional ethics, and modern supervision theories. The findings indicate that educational supervision functions not merely as a technical process to improve teacher performance but

also as a moral practice that requires responsibility, empathy, and respect for human dignity. Ethically grounded supervision plays a crucial role in fostering dialogical, trusting, and empowering relationships between supervisors and teachers. From a humanistic perspective, the ultimate goal of supervision is to cultivate reflective, autonomous, and virtuous teachers, rather than simply enhancing pedagogical skills. Therefore, educational supervision should be understood as a process of humanization that recognizes teachers as subjects with inherent value and potential, not merely as objects of evaluation. This study concludes that the moral dimension of supervision is the essential foundation for building an ethical, just, and human-centered educational culture.

Keywords : educational supervision, ethics, humanization, morality, teacher development

PENDAHULUAN

Supervisi Pendidikan merupakan pilar penting dalam system manajemen sekolah untuk memastikan proses belajar mengajar berlangsung efektif dan bermutu. Selama beberapa decade, praktik supervise di Indonesia sering dipersepsikan sebagai pengawasan administratif: kegiatan memeriksa perangkat pembelajaran, menilai kehadiran guru, dan mengevaluasi dokumen, pandangan sempit ini menempatkan supervise sekadar alat kontrol birokratis, sehingga menimbulkan jarak antara supervise sebagai “inspeksi” yang menegangkan alih-alih proses pembinaan yang membebaskan dan menguatkan.

Seiring perkembangan ilmu Pendidikan dan tuntutan global, paradigma tersebut mulai bergeser. Hakikat supervise sejati adalah proses pendampingan professional yang berlandaskan kepercayaan, empati, dan tanggung jawab moral. Supervisor diharapkan menjadi mitra pedagogis, bukan semata evaluator kesalahan. Pandangan ini sejalan dengan gagasan humanizing education yang menekankan martabat manusia dalam setiap relasi Pendidikan.¹

Di Indonesia, pergeseran paradigma ini didukung oleh berbagai kebijakan. Permendikbudristek no. 40 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan menegaskan pentingnya pembinaan guru melalui pendekatan reflektif dan partisipatif.² Supervisi tidak lagi hanya memeriksa kepatuhan administrasi, tetapi mendorong guru mengembangkan profesionalisme dan integritas etis. Selaras dengan itu, Merdeka Belajar menggarisbawahi pentingnya otonomi dan kolaborasi, menurut supervisor memiliki sensitivitas moral dalam membina guru.

¹ F. Anggraini dkk., “Integrasi Nilai Etika dalam Supervisi Pendidikan: Kajian Literatur Sistematis,” *Alacrity: Journal Of Education*, 2025, hlm. 12

² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.

Konteks global juga memperkuat urgensi ini. Pandemi COVID-19 mengakselerasi penggunaan teknologi dan menuntut fleksibilitas pembelajaran. Banyak riset mutakhir menyoroti pentingnya transformational supervision yang mengutamakan dialog, empati, dan kesejahteraan guru.³ Pendekatan seperti clinical supervision dan transformative coaching menempatkan supervisi sebagai proses kemitraan, dengan orientasi pada pengembangan holistik guru, bukan sekedar pencapaian target administratif.

Dimensi etika dan humanisasi menjadi krusial karena guru bukan hanya pelaksana kurikulum, tetapi juga pribadi dengan nilai, emosi, dan aspirasi. Supervisor yang mengabaikan aspek moral berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan menurunkan motivasi guru. Sebaliknya, supervisi yang dilandasi prinsip moral seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat membangun iklim sekolah yang sehat, memacu inovasi, dan menumbuhkan rasa memiliki.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai “Supervisi Pendidikan sebagai Tindakan Moral”. Kajian ini menyoroti bagaimana integrasi etika dan humanisasi dapat memperkuat peran supervisi sebagai proses pembinaan guru yang tidak hanya meningkatkan kompetensi pedagogik, tetapi juga membentuk karakter professional yang berakhlak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada telaah konseptual dan filosofis terhadap nilai-nilai moral, etika, dan humanisasi dalam supervisi pendidikan. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai sumber teoretis dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, sehingga dapat membangun pemahaman mendalam mengenai supervisi sebagai tindakan moral tanpa harus melakukan observasi atau wawancara langsung.

Langkah awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik. Sumber yang digunakan meliputi buku-buku filsafat pendidikan, karya ilmiah tentang etika profesi, teori supervisi pendidikan, serta tulisan-tulisan mengenai humanisasi dalam konteks pembelajaran dan pembinaan guru. Pemilihan literatur dilakukan

³ Putri Bestari dkk., “Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Era Digital,” *Papada Journal*, 2023, hlm. 44.

secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kedalaman analisis yang ditawarkan oleh masing-masing sumber.

Tahap berikutnya adalah analisis dan sintesis literatur, di mana setiap konsep dan teori dikaji secara mendalam untuk menemukan keterkaitan antara supervisi, moralitas, dan humanisasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan reflektif, yaitu menafsirkan makna filosofis dari supervisi pendidikan sebagai praktik yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Sintesis dilakukan dengan menyatukan pandangan-pandangan yang sejalan untuk membentuk kerangka berpikir yang utuh dan koheren.

Proses interpretasi filosofis menjadi inti dari penelitian ini. Peneliti menelaah secara kritis bagaimana nilai-nilai moral, seperti tanggung jawab, keadilan, empati, dan penghargaan terhadap martabat manusia, terintegrasi dalam praktik supervisi pendidikan. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif—menilai sejauh mana teori dan praktik supervisi yang ada mencerminkan prinsip etika dan humanisasi yang ideal dalam pembinaan guru.

Akhirnya, hasil dari analisis pustaka ini disusun secara sistematis untuk merumuskan pemahaman baru mengenai supervisi pendidikan sebagai tindakan moral. Temuan-temuan konseptual diinterpretasikan sebagai dasar normatif bagi pengembangan model supervisi yang lebih manusiawi dan beretika. Dengan demikian, metode studi pustaka dalam penelitian ini tidak sekadar menghimpun informasi, tetapi juga membangun refleksi filosofis yang memperkaya wacana teoritis tentang peran moral dan kemanusiaan dalam supervisi pendidikan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Supervisi pendidikan, sebagai suatu praktik yang esensial dalam ekosistem pembelajaran, tidak boleh direduksi menjadi sekadar rutinitas administratif atau mekanisme pengawasan teknis yang kaku terhadap kinerja guru semata, melainkan harus dipahami secara mendalam sebagai tindakan moral yang berakar pada keyakinan filosofis mendalam bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses humanisasi yang bertujuan untuk memanusiakan manusia, sehingga individu-individu tersebut mampu menjalani kehidupan yang bermartabat, dipandu oleh akal budi yang matang, dan secara aktif berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat yang lebih inklusif dan adil; dalam kerangka pemahaman ini, peran pengawas atau supervisor tidak lagi diposisikan sebagai figur otoriter yang menilai dari ketinggian hierarki kekuasaan, melainkan sebagai pendamping moral yang telaten memastikan bahwa setiap praktik

pembelajaran tetap setia pada prinsip-prinsip etis, dengan menghormati hak-hak intrinsik guru dan peserta didik sebagai subjek-subjek berharga yang memiliki martabat inheren, sehingga supervisi pendidikan pada akhirnya menjadi aktivitas transformatif yang menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan sejati, bukanlah sekadar alat untuk mendeteksi kesalahan atau kekurangan guru yang bersifat superfisial, melainkan instrumen untuk membangun komunitas belajar yang penuh empati dan saling mendukung, di mana setiap interaksi menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen kolektif terhadap pendidikan sebagai panggilan moral yang abadi; pemikiran ini semakin diperkaya oleh warisan lokal Indonesia melalui pandangan Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional, yang dengan visioner menyatakan bahwa pendidikan harus berfungsi sebagai "menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya", di mana prinsip "menuntun" ini bukanlah sekadar metafor pedagogis, melainkan fondasi filosofis yang selaras sempurna dengan esensi supervisi beretika, yang menekankan bahwa tugas utama pengawas bukanlah memaksakan perubahan melalui perintah atau sanksi yang represif, melainkan dengan lembut menuntun guru menuju kesadaran profesional dan moral yang autentik, sehingga proses supervisi menjadi jembatan yang menghubungkan potensi bawaan individu dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang berintegritas dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Secara filosofis yang lebih mendalam, landasan etika dalam supervisi pendidikan didasarkan pada tiga aliran pemikiran utama yang saling melengkapi dan membentuk kerangka holistik untuk praktik yang bertanggung jawab, dimulai dari etika deontologis yang berpijak pada gagasan fundamental bahwa tindakan moral tidaklah ditentukan oleh konsekuensi empiris atau hasil akhir yang dicapai, melainkan oleh kewajiban moral intrinsik yang melekat pada diri pelaku sebagai makhluk rasional yang bertanggung jawab, sehingga dalam konteks supervisi, seorang supervisor diwajibkan untuk memperlakukan guru dengan standar keadilan yang tak tergoyahkan, menghormati otonomi profesional mereka sebagai agen independen dalam proses belajar mengajar, dan tegas menolak segala bentuk manipulasi emosional atau tekanan struktural yang dapat merusak dinamika hubungan mentor-mentee; misalnya, seorang supervisor harus mempertahankan objektivitas mutlak meskipun dihadapkan pada situasi kompleks seperti menilai kinerja guru yang merupakan sahabat dekat atau bahkan bawahan

langsung dari atasan institusional, di mana laporan supervisi wajib disusun berdasarkan fakta lapangan yang teliti dan verifiable, bukan dipengaruhi oleh rasa sungkan sosial, loyalitas pribadi, atau ambisi karir yang sempit, sehingga keadilan dan kejujuran bukan hanya menjadi ukuran utama moralitas tugas, melainkan pilar yang menjaga integritas seluruh sistem pendidikan dari korupsi etis yang halus; aliran ini mengingatkan kita bahwa supervisi, sebagai tindakan moral, harus selalu selaras dengan imperatif kategoris yang universal, di mana kewajiban untuk bertindak benar menjadi prioritas mutlak, terlepas dari konteks eksternal yang mungkin menggoda untuk mengorbankan prinsip demi efisiensi atau harmoni sementara.

Selanjutnya, humanisme eksistensial menawarkan perspektif yang mendalam dengan memandang manusia sebagai makhluk bebas yang pada dasarnya bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan dan tindakan mereka dalam menghadapi absurditas eksistensial kehidupan, sehingga dalam ranah supervisi pendidikan, guru tidak lagi dilihat sebagai entitas homogen yang dapat diseragamkan melalui protokol standar, melainkan sebagai individu-individu unik yang masing-masing membawa potensi eksistensial yang tak tergantikan, lengkap dengan narasi pribadi, pengalaman hidup, dan aspirasi yang membentuk identitas profesional mereka; peran supervisor di sini bertransformasi menjadi katalisator untuk membangkitkan kesadaran reflektif yang mendalam dalam diri guru, memungkinkan mereka untuk menyelami makna profesi pendidikan secara autentik dan eksistensial, di mana supervisi humanistic dengan tegas menolak paradigma reduksionis yang menempatkan guru sebagai "objek penilaian" pasif yang rentan dieksploitasi, dan sebaliknya memposisikan mereka sebagai "subjek belajar" yang sedang dalam perjalanan ontologis menuju profesionalisme sejati yang dipenuhi makna, sehingga proses supervisi menjadi arena di mana guru diajak untuk menghadapi kebebasan mereka sendiri, merefleksikan pilihan pedagogis mereka, dan bertanggung jawab atas dampak etis dari praktik kelas mereka, yang pada akhirnya tidak hanya meningkatkan kualitas pengajaran tetapi juga memperkaya eksistensi guru sebagai manusia yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap generasi mendatang; aliran ini, yang dipengaruhi oleh pemikir seperti Jean-Paul Sartre dan Martin Heidegger, menekankan bahwa autentisitas dalam supervisi muncul ketika supervisor memfasilitasi momen-momen epifani reflektif, di mana guru tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga menemukan tujuan yang lebih dalam dalam panggilan pendidikannya, sehingga supervisi menjadi alat pembebasan eksistensial daripada penindasan struktural.

Sementara itu, pragmatisme John Dewey memberikan kontribusi filosofis yang sangat kontekstual dengan menegaskan bahwa pengetahuan sejati dan perkembangan moral tidak lahir dari doktrin teoritis yang abstrak dan kaku, melainkan dari pengalaman konkret yang direfleksikan secara kritis dan kolaboratif, sehingga dalam kerangka supervisi pendidikan, prinsip ini diterjemahkan menjadi keyakinan bahwa peningkatan kualitas pembelajaran hanya dapat terealisasi secara berkelanjutan ketika supervisor dan guru secara bersama-sama belajar dari pengalaman nyata di ruang kelas, di mana supervisor tidak datang dengan agenda teoretis yang dogmatis atau checklist yang mekanis, melainkan dengan semangat kolaborasi yang dinamis untuk menganalisis secara mendalam apa yang benar-benar terjadi dalam interaksi guru-siswa, mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari data empiris, mencari solusi inovatif yang kontekstual, dan menerapkan perbaikan berkelanjutan yang berbasis pada siklus pengalaman-refleksi-aksi; Dewey, melalui konsep "inquiry" atau penyelidikan, mengajak kita untuk melihat supervisi sebagai proses demokratis di mana pengetahuan pedagogis dibangun secara kolektif, dengan guru sebagai mitra setara yang membawa wawasan lapangan yang tak tergantikan, sehingga supervisi pragmatis tidak hanya menargetkan efisiensi operasional, tetapi juga pertumbuhan intelektual dan etis yang holistik, di mana setiap observasi menjadi peluang untuk bereksperimen dengan pendekatan baru, mengevaluasi hasilnya melalui lensa pengalaman, dan menyesuaikan strategi demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif, seperti pengembangan siswa sebagai warga negara yang kritis dan adaptif; dengan demikian, pragmatisme Dewey melengkapi dua aliran sebelumnya dengan menambahkan dimensi praktis yang grounded, memastikan bahwa etika supervisi tidak tetap abstrak, melainkan terwujud dalam tindakan sehari-hari yang transformatif dan berorientasi pada kemajuan sosial yang nyata.

Dalam dimensi etika dan prinsip humanisasi yang menjadi inti dari praktik supervisi pendidikan di sekolah, etika tersebut tidak terbatas pada perilaku pribadi supervisor yang incidental, melainkan meresap ke dalam mekanisme sistemik, struktur organisasional, dan budaya kerja yang mengatur seluruh interaksi antara supervisor, guru, dan lembaga pendidikan secara keseluruhan, sehingga etika bukan sekadar "sopan santun profesional" yang superfisial atau norma etiket yang formal, melainkan "roh moral" yang menjiwai dan menginfeksi setiap tahap proses pembinaan, menciptakan ekosistem di mana kepercayaan, transparansi, dan saling menghargai menjadi norma yang tak tergoyahkan; ada tiga dimensi utama yang perlu diperhatikan secara teliti dalam praktik supervisi untuk mewujudkan visi ini, yang pertama

adalah keadilan prosedural yang menuntut agar setiap guru, tanpa memandang latar belakang, pengalaman, atau status sosial mereka, memperoleh kesempatan yang setara dan adil dalam proses pembinaan profesional, di mana supervisi yang benar-benar etis harus didukung oleh instrumen observasi yang jelas dan tervalidasi secara ilmiah, kriteria penilaian yang transparan serta bebas dari bias subyektif, serta proses evaluasi yang dilindungi dari intervensi kepentingan pribadi, politik internal sekolah, atau tekanan eksternal dari pemangku kepentingan; misalnya, ketika seorang supervisor melakukan penilaian kinerja, hasil observasi tidak boleh tercemar oleh faktor relasional seperti kedekatan emosional atau preferensi pribadi yang irasional, melainkan harus didasarkan pada bukti empiris yang objektif, dengan transparansi yang memungkinkan guru untuk memahami dasar penilaian dan bahkan berkontribusi dalam prosesnya, sehingga keadilan prosedural tidak hanya membangun kepercayaan guru terhadap sistem pembinaan, tetapi juga mencegah disintegrasi moral lembaga akibat ketidakadilan yang merusak motivasi dan retensi tenaga pengajar; dimensi kedua, kejujuran akademik, muncul sebagai nilai inti yang tak tergantikan dalam setiap aspek supervisi, di mana laporan dan dokumentasi supervisi wajib mencerminkan realitas lapangan secara akurat dan tidak terdistorsi, bukan disesuaikan secara artifisial untuk menampilkan citra sekolah yang ideal di atas kertas atau memenuhi target administratif yang sepihak, karena manipulasi data semacam itu bukan hanya melanggar integritas pribadi supervisor, tetapi juga melemahkan fondasi etis lembaga pendidikan secara keseluruhan, merusak kredibilitas proses pembelajaran, dan pada akhirnya merugikan siswa yang menjadi korban dari ilusi kualitas; dalam etika profesional yang matang, kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kenyamanan sementara atau pelestarian harmoni palsu, sehingga supervisor harus dilatih untuk menyampaikan hasil observasi secara objektif namun konstruktif, dengan bahasa yang membangun semangat perbaikan daripada menimbulkan rasa malu atau defensif, memastikan bahwa kejujuran menjadi alat pemberdayaan yang mendorong guru untuk tumbuh tanpa rasa takut; dimensi ketiga, tanggung jawab profesional, menyoroti kewajiban moral supervisor untuk menangani informasi sensitif yang sering kali muncul selama observasi kelas—seperti kekurangan pedagogik yang mendalam, dinamika interpersonal yang rumit antar guru, atau bahkan isu internal sekolah yang rahasia—dengan standar kerahasiaan yang ketat dan tak bisa ditawar, karena pelanggaran kerahasiaan bukan hanya merusak kepercayaan individu, tetapi juga dapat memicu konflik sistemik yang menghambat kolaborasi; prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam regulasi nasional seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang

Etika Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang dengan tegas menuntut setiap tenaga kependidikan untuk menjaga martabat, integritas, dan rahasia jabatan sebagai bagian integral dari komitmen profesional, sehingga tanggung jawab ini menjadi benteng etis yang melindungi kerentanan guru dan memastikan bahwa supervisi tetap menjadi ruang aman untuk pertumbuhan autentik.

Sementara itu, prinsip humanisasi dalam pembinaan guru menegaskan bahwa guru bukanlah sekadar alat produksi pembelajaran yang dapat diukur secara mekanis atau dieksploitasi demi output kuantitatif, melainkan manusia holistik yang membawa serta emosi yang kompleks, cita-cita yang mendalam, dan idealisme pendidikan yang membara, sehingga pendekatan humanis dalam supervisi mengharuskan perlakuan terhadap guru dengan empati yang tulus dan penghargaan mendalam terhadap pengalaman hidup serta perjuangan profesional mereka, yang sering kali tidak terlihat di balik rutinitas harian; beberapa strategi humanistik yang esensial untuk diimplementasikan meliputi pendekatan kolaboratif yang mengubah supervisi dari model hierarkis tradisional menjadi proses partisipatif yang inklusif, di mana guru diajak secara aktif terlibat sejak tahap perencanaan observasi—seperti mendefinisikan tujuan bersama dan memilih fokus evaluasi—melalui pelaksanaan observasi yang non-intrusif, hingga tahap refleksi pasca-observasi yang menjadi momen co-creation solusi, sehingga guru merasa dihargai sebagai subjek utama dalam ekosistem pembelajaran daripada objek pasif yang dinilai, dan paradigma lama supervisi sebagai "pengawasan dari atas" yang menimbulkan rasa takut pun bertransformasi menjadi "pendampingan sejajar" yang membangun rasa memiliki dan motivasi intrinsik; strategi kedua, refleksi dialogis, memposisikan proses pasca-observasi sebagai ruang dialog terbuka dan mendalam antara guru dan supervisor, di mana interaksi bukan lagi sekadar sesi evaluasi satu arah yang penuh dengan kritik destruktif, melainkan diskusi reflektif yang dirancang untuk menumbuhkan kesadaran profesional melalui pertanyaan-pertanyaan provokatif yang menggugah pemikiran kritis, seperti "Apa yang Anda rasakan saat siswa merespons pelajaran Anda dengan cara itu?" atau "Bagaimana pengalaman ini dapat membentuk pendekatan Anda selanjutnya?", sehingga supervisor menghindari nada menggurui yang merendahkan dan sebaliknya berperan sebagai fasilitator yang empati, memungkinkan guru untuk mengartikulasikan wawasan mereka sendiri dan menemukan jalur pertumbuhan yang autentik; strategi ketiga, penguatan well-being guru, mengakui realitas bahwa banyak guru menghadapi beban berat dari tuntutan administratif yang melelahkan, tekanan performa hasil belajar yang tak realistis, dan minimnya dukungan

psikologis institusional, yang sering kali mengakibatkan burnout kronis dan penurunan kualitas pengajaran, sehingga supervisor perlu berevolusi menjadi pendamping emosional yang proaktif, dengan inisiatif seperti sesi check-in reguler untuk mendiskusikan keseimbangan kerja-hidup, rekomendasi sumber daya kesehatan mental, atau bahkan advokasi kebijakan sekolah yang mendukung cuti restoratif, karena penelitian empiris secara konsisten menunjukkan korelasi positif yang kuat antara kesejahteraan psikologis guru dengan mutu pembelajaran yang lebih tinggi, motivasi siswa yang meningkat, dan retensi tenaga pengajar yang berkelanjutan, sehingga humanisasi ini bukanlah kemewahan, melainkan investasi strategis untuk keberlanjutan sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Untuk menerapkan prinsip etika dan humanisasi secara konkret dan terintegrasi dalam meningkatkan profesionalitas serta kesejahteraan guru, beberapa model supervisi beretika dan humanis dapat diadopsi secara terpadu sebagai kerangka operasional yang fleksibel, yang pertama adalah supervisi klinis atau *clinical supervision* yang berfokus secara intensif pada interaksi profesional yang mendalam antara guru dan supervisor melalui siklus tiga tahap yang saling terkait—pra-observasi untuk membangun pemahaman bersama tentang konteks kelas dan ekspektasi, observasi langsung yang dilakukan dengan etika non-judgmental dan berbasis data, serta pasca-observasi untuk debriefing yang kolaboratif—di mana seluruh proses didasarkan pada komunikasi terbuka yang penuh rasa hormat, analisis data faktual yang obyektif, dan umpan balik yang actionable, sehingga kelebihanannya terletak pada keterlibatan aktif guru yang membuat mereka memahami hasil evaluasi sebagai alat pemberdayaan daripada kritik yang merendahkan, memungkinkan pertumbuhan profesional yang berkelanjutan melalui refleksi yang dipandu; model kedua, supervisi pengembangan atau *developmental supervision*, dibangun atas teori perkembangan profesional guru yang mengakui bahwa tingkat kesiapan individu bervariasi, sehingga pendekatan supervisor disesuaikan secara dinamis dengan tahap kemandirian guru—apakah masih memerlukan arahan langsung yang struktural untuk pemula, bimbingan kolaboratif yang interaktif untuk tahap transisi, atau hanya fasilitasi ringan yang mendukung otonomi untuk guru senior—di mana supervisor berperan sebagai mentor adaptif yang sensitif terhadap kebutuhan nyata di lapangan, seperti mengintegrasikan umpan balik personal dengan sumber daya pengembangan karir, sehingga model ini tidak hanya meningkatkan keterampilan pedagogik, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan ketahanan emosional guru melalui dukungan yang dipersonalisasi; model ketiga, supervisi sejawat atau *peer supervision*, merevolusi dinamika tradisional dengan melibatkan guru sejawat sebagai

pengamat dan pemberi umpan balik satu sama lain dalam sesi yang terstruktur, yang menumbuhkan solidaritas profesional yang kuat, mengurangi jarak hierarkis yang sering kali menimbulkan ketakutan, dan menciptakan komunitas belajar profesional di sekolah di mana setiap guru menjadi pembelajar seumur hidup yang saling menginspirasi, dengan protokol yang menekankan kerahasiaan, empati, dan fokus pada kekuatan daripada kelemahan, sehingga pendekatan ini tidak hanya mendemokratisasi supervisi, tetapi juga memperkaya perspektif kolektif melalui berbagi pengalaman lintas disiplin.

Agar model-model tersebut dapat diwujudkan secara efektif sebagai tindakan moral dan humanis yang benar-benar transformatif, beberapa strategi supervisi beretika dan humanis perlu diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, yang dimulai dari pelatihan etika dan coaching profesional yang komprehensif bagi pengawas serta kepala sekolah, di mana program pelatihan ini mencakup modul-modul mendalam tentang prinsip etika profesi yang berbasis kasus nyata, keterampilan komunikasi empatik yang melatih active listening dan non-verbal cues, serta teknik coaching yang evidence-based untuk membimbing guru tanpa mengambil alih inisiatif mereka, sehingga peserta dilengkapi dengan toolkit untuk membimbing secara efektif sambil menjaga batas etis, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas supervisi secara keseluruhan; strategi kedua, integrasi supervisi dalam Kurikulum Merdeka Belajar, menuntut agar supervisi tidak lagi diperlakukan sebagai kegiatan terpisah yang episodik, melainkan menjadi elemen integral dari siklus refleksi pembelajaran guru yang holistik, seperti melalui budaya coaching reflection meeting mingguan yang melibatkan tim pengajar untuk mendiskusikan tantangan dan inovasi kelas secara kolaboratif, selaras dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas dan pengembangan karakter, sehingga supervisi menjadi pendorong utama untuk adaptasi pedagogis yang kontekstual dan berorientasi siswa; strategi ketiga, evaluasi partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan—guru, siswa, orang tua, dan bahkan komunitas sekolah—dalam proses evaluasi supervisi untuk menciptakan transparansi yang mutlak dan rasa memiliki kolektif terhadap upaya peningkatan mutu pembelajaran, di mana umpan balik multi-sumber dikumpulkan melalui survei anonim, focus group discussion, atau portofolio reflektif, memastikan bahwa evaluasi bukanlah proses top-down yang alienasi, melainkan dialog demokratis yang memperkaya wawasan dan membangun komitmen bersama; akhirnya, strategi penguatan budaya apresiasi menekankan bahwa supervisi harus berimbang antara identifikasi kekurangan dengan selebrasi pencapaian, di mana pemberian pengakuan publik atau pribadi atas inovasi kecil guru—seperti adaptasi metode pengajaran yang kreatif

atau inisiatif dukungan siswa—dilakukan melalui newsletter sekolah, sertifikat penghargaan, atau sesi sharing best practices, yang secara empiris terbukti memotivasi guru untuk terus berkembang dengan rasa syukur dan antusiasme, sehingga budaya ini mengubah narasi supervisi dari ancaman menjadi peluang, memupuk lingkungan kerja yang penuh afirmasi dan mendukung kesejahteraan holistik guru sebagai fondasi utama untuk pendidikan berkualitas.

KESIMPULAN

Dalam merangkum esensi dari landasan filosofis supervisi pendidikan sebagai tindakan moral, dapat disimpulkan bahwa praktik ini bukanlah sekadar mekanisme administratif yang bersifat instrumental, melainkan manifestasi dari komitmen etis yang mendalam terhadap humanisasi sebagai inti pendidikan, di mana setiap intervensi supervisor menjadi jembatan antara potensi bawaan guru dan tanggung jawab sosial yang lebih luas, sebagaimana diilustrasikan oleh prinsip "menuntun" Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendampingan daripada paksaan, sehingga supervisi bertransformasi menjadi proses reflektif yang menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kejujuran, dan empati, yang pada gilirannya memperkuat fondasi lembaga pendidikan sebagai ruang aman untuk pertumbuhan holistik; tiga aliran filosofis utama—etika deontologis dengan penekanannya pada kewajiban intrinsik, humanisme eksistensial yang membebaskan potensi individu melalui kesadaran autentik, serta pragmatisme John Dewey yang membumikan pengetahuan pada pengalaman kolaboratif—bersama-sama membentuk kerangka yang kokoh, memastikan bahwa supervisi tidak hanya mengejar efisiensi teknis, tetapi juga membangun karakter moral yang berkelanjutan, di mana supervisor sebagai pendamping etis bertanggung jawab untuk menjaga otonomi profesional guru sambil mendorong kontribusi mereka terhadap masyarakat yang lebih bermartabat dan inklusif, sehingga pada akhirnya, pendekatan ini menjadi instrumen transformatif yang selaras dengan visi pendidikan nasional untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan kolektif melalui pengembangan akal budi yang matang dan bertanggung jawab.

BIBLIOGRAFI

- A. Harjanto, *Etika Profesi Pendidikan*, Jakarta:Rajawali Press, 2022, hlm. 55
- F. Anggraini dkk., "Integrasi Nilai Etika dalam Supervisi Pendidikan: Kajian Literatur Sistematis," *Alacrity: Journal Of Education*, 2025, hlm. 12
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Permendikbud No. 38 Tahun 2020*.

- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek No. 40 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama Pendidikan*, Yogyakarta: Taman Siswa, 2021, hlm. 22.
- L. Wijaya, *Kesejahteraan Guru dan Mutu Pembelajaran*, Bndung: Alfabeta, 2023, hlm. 89.
- M. Rohman, "Humanisasi Pendidikan", *Jurnal Filsafat dan Pendidikan* 12, no. 1 (2021): 14.
- N. Kartika, "Etika Supervisi Modern," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 7, no, 2 (2023): 41.
- Putri Bestari dkk., "Peran Supervisi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Era Digital," *Papada Journal*, 2023, hlm. 44.
- S. Handayani, "Kolaborasi Guru-Pengawas dalam Era Merdeka Belajar," *Jurnal Kependidikan* 14, no. 1 (2022): 77.